

Diplomasi Indonesia untuk Palestina

Oleh **Edi Maszudi**



KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta 6-7 Maret 2016 mempunyai makna khusus bagi diplomasi Indonesia dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi. Dukungan untuk kemerdekaan dan persatuan bangsa Palestina adalah wujud konsistensi Indonesia dalam mewujudkan dunia yang bebas penjajahan dan terwujudnya perdamaian dunia.

Dalam KTT luar biasa ini, OKI khusus akan membahas masalah Palestina dan perkembangan terkini masalah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Sesuai dengan rencana, KTT luar biasa OKI ini akan dihadiri oleh 47 negara. Sebenarnya tuan rumah KTT luar biasa yang kelima tahun 2016 ini adalah Maroko, tetapi dibatalkan atas permintaan OKI dan Palestina. Lalu Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah.

Lantas, apakah makna KTT Luar Biasa Ke-5 OKI kali ini bagi diplomasi Indonesia? Bagaimana pengaruh isu pendudukan Masjid Al-Aqsa oleh Israel bagi dunia Islam dan politik internasional?

OKI atau Organisasi Kerja Sama Islam (dahulu Organisasi Konferensi Islam) adalah sebuah organisasi internasional memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011

Organisasi OKI dibentuk mempunyai tujuan antara lain meningkatkan solidaritas Islam antaranggotanya. Selain itu, berusaha menghapuskan perbedaan rasial, kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya, serta masalah diskriminasi.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari 252 juta penduduk Indonesia, 82%

adalah beragama Islam. Oleh karena itu masalah umat di belahan bumi mana pun menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Isu pendudukan Palestina, Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa oleh Israel menjadi isu juga di Indonesia.

Pelaksanaan KTT Luar Biasa Ke-5 OKI yang berlangsung di Jakarta menjadi penting bagi Pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan luar negeri Indonesia harus dapat mencerminkan transformasi demokratis di dalam negeri. Pada Pemerintahan Joko Widodo, perlu ditekankan pentingnya dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan bagi efektivitas politik luar negeri Indonesia dalam memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan internasional.

Harga Mati

Menurut penulis, ada lima makna khusus bagi Pemerintahan Joko Widodo dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, mencari tero-



basan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan dunia Islam sehingga aspirasi umat Islam Indonesia bisa diwujudkan lewat kebijakan strategis.

Pertama, dukungan untuk kemerdekaan Palestina adalah harga mati yang harus diperjuangkan Presiden Joko Widodo dalam forum-forum internasional. Sampai sekarang Palestina masih dalam pendudukan Israel. Bahkan aktivis pro kemerdekaan Palestina baik yang tergabung dalam Hamas maupun Fatah sering dimasukkan dalam daftar pelaku teroris oleh Israel dan sekutunya. Padahal mereka adalah pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

Kedua, penguasaan dan pengendalian Masjid Al-Aqsa dan penguasaan kota Al-Quds (Yerusalem) oleh Israel harus segera diakhiri. Al-Quds atau dikena dengan Yerusalem adalah kota tua yang menjadi rebutan tiga agama Samawi yakni Yahudi, Islam dan Kristen. Secara arkeologis dan historis ketiga agama tersebut mempunyai ikatan psikologis dengan kota tua tersebut. Solusi yang terbaik adalah menjadikan kota tua tersebut sebuah kota internasional dalam pengawasan PBB. Sebab di bawah PBB atau United Nations para peziarah bisa melakukan ibadah di tempat-tempat yang disucikan tiga agama tersebut.

Ketiga, munculnya generasi pemimpin di Timur Tengah (Middle East) lebih muda dan mempunyai pendidikan tinggi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Naiknya generasi baru di Timteng akan memberikan nuansa yang berbeda dari pendahulunya.

Keempat, transisi demokrasi di Timteng tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mesir yang seharusnya memiliki pemerintahan demokratis kembali ke sistem militer yang didukung AS.

Kelima, penguasaan sumber-sumber energi dunia adalah masalah sumber konflik utama dalam panggung politik internasional pada abad-21. Timteng adalah wilayah yang menguasai 2/3 minyak bumi dunia. Oleh karena itu negara-negara besar selalu ikut campur tangan bila terjadi konflik di Timur Tengah untuk mengamankan sumber energi hingga berjualan senjata.

Indonesia dengan Presiden Joko Widodo mempunyai potensi untuk melakukan penyelesaian masalah Palestina dan status kota Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem). Caranya dengan pendekatan baru, memberikan pilihan-pilihan yang memadai, termasuk pilihan untuk Israel. Diperlukan perundingan langsung sehingga solusi damai untuk kemerdekaan Palestina segera tercapai. Indonesia bersama OKI, Insya Allah mampu memberikan solusi damai bagi kemerdekaan Palestina. (47)

—**Edi Maszudi SIP MM, alumnus FISIP Hubungan Internasional UMY, dosen STIE YKP Yogyakarta.**